

Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Khairani Alawiyah Matondang¹ Nazwa Fazirah Nasution² Zakia Hasanah Hasibuan³
Arnol Prabowo Siagian⁴

Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia^{1,2,3,4}

Email:

Abstract

Poverty is a global and multidimensional issue affecting every country, including Indonesia. This study analyzes the impact of the Labor Force Participation Rate (LFPR) and the Human Development Index (HDI) on poverty in North Sumatra Province during the period from 2017 to 2022. Data were analyzed using panel data regression models, specifically the Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), and Random Effect Model (REM). The Chow and Hausman tests indicated that the REM is better suited to explain the variations in poverty compared to the other models. The study found that the HDI has a significant negative impact on poverty, suggesting that an increase in HDI contributes to poverty reduction. However, the LFPR did not show a significant impact on poverty in the REM. These findings have important policy implications for the government in enhancing HDI as a strategy to reduce poverty in North Sumatra. The inconsistency between theory and empirical results also indicates the need for further research to understand the dynamics between LFPR and poverty.

Keywords: Labor Force Participation Rate (LFPR), Human Development Index (HDI), Poverty, North Sumatra

Abstrak

Masalah kemiskinan adalah isu global dan multidimensional yang memengaruhi setiap negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2022. Data dianalisis menggunakan model regresi data panel dengan pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Hasil uji Chow dan Hausman menunjukkan bahwa model REM lebih baik dalam menjelaskan variasi kemiskinan dibandingkan model lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan, menunjukkan bahwa peningkatan IPM berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Namun, TPAK tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan dalam model REM. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan IPM sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan di Sumatera Utara. Adanya inkonsistensi antara teori dan hasil empiris juga menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika antara TPAK dan kemiskinan.

Kata Kunci: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, Sumatera Utara

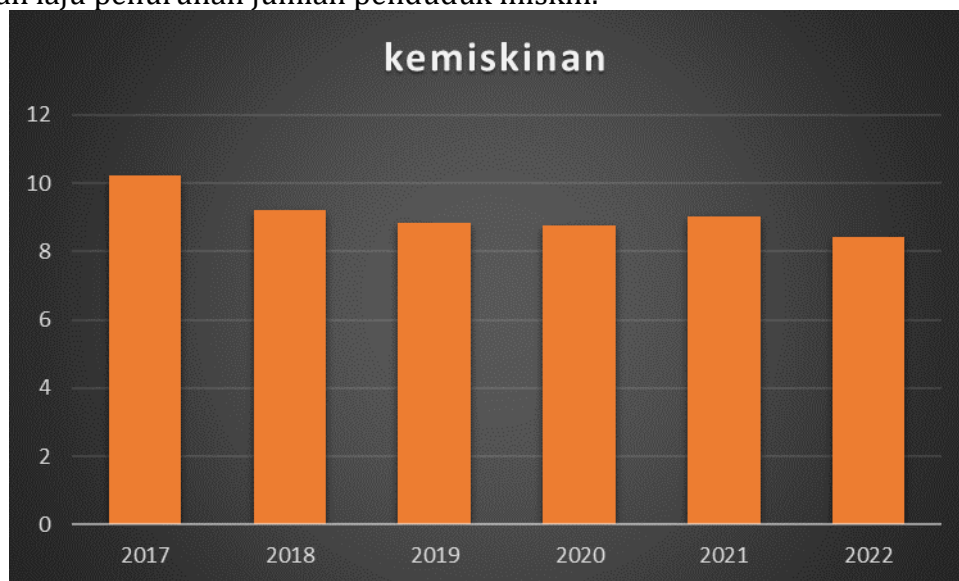


This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang memiliki sifat global dan multidimensi. Kemiskinan ini merupakan masalah yang akan dirasakan seluruh negara yang ada di dunia atau dengan kata lain tidak ada satupun negara yang dapat terhindar dari ancaman permasalahan kemiskinan. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum didefinisikan sebagai kemiskinan (Kuncoro, 2010). Menurut Bank Dunia (2012), salah satu penyebab kemiskinan

adalah kurangnya pendapatan dan aset yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, kemiskinan juga dikaitkan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, dan kebanyakan orang yang dianggap miskin tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang umumnya rendah. Secara sederhana, kemiskinan adalah ketika seseorang tidak memiliki cukup uang atau barang-barang yang diperlukan untuk bertahan hidup (Husna & Yudhistira, 2017). Perbedaan tingkatan kemiskinan ini tidak hanya dilihat dari negara yang berbeda, bahkan dalam satu negara juga akan memiliki tingkatan kemiskinan yang juga berbeda di setiap daerahnya. Begitu juga dengan Indonesia, dimana angka kemiskinan memiliki tingkatan perbedaan di 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Tidak hanya terjadi di level Indonesia, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan tentunya juga terjadi di level provinsi khususnya Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera dan memiliki luas wilayah sekitar 72.981,23 km². Wilayah administratif Sumatera Utara terbagi menjadi 25 kabupaten dan 8 kota. Sumatera Utara memiliki misi pembangunan diantaranya ialah Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, Fokus pada penyediaan lapangan pekerjaan dan pemenuhan akses pendidikan, Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata. Hal ini dapat diwujudkan dengan memerlukan beberapa indikator, salah satu indikator yang utama adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin.

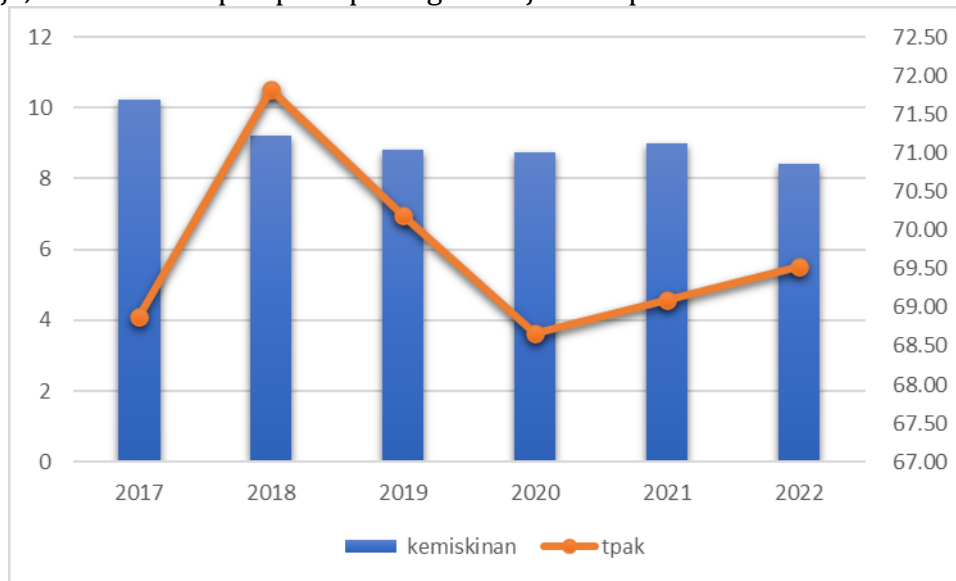


Gambar 1. Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Di Sumatera Utara 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

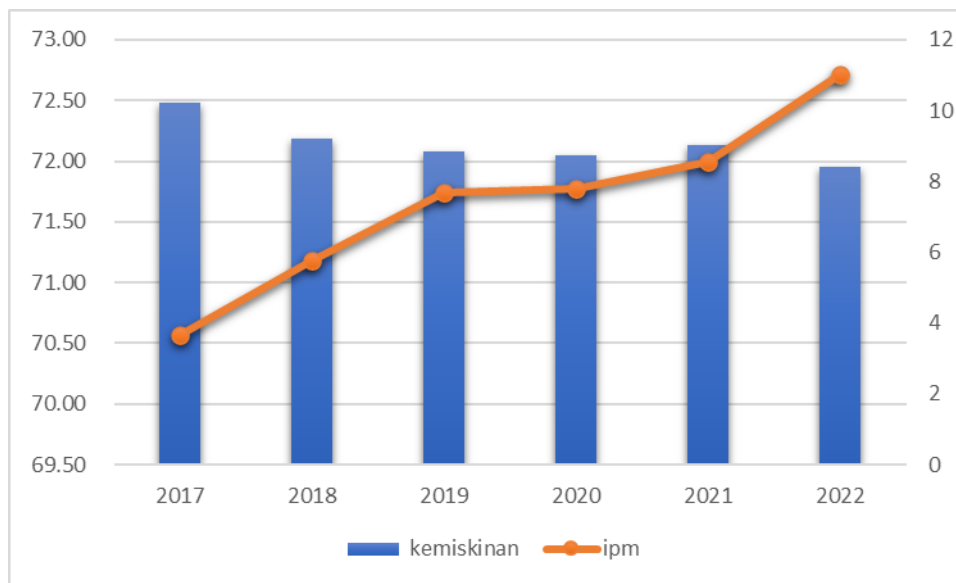
Berdasarkan Gambar 1 di atas, memperlihatkan bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2021 persentase jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 0,26 %. Dimana pada tahun 2020 persentase jumlah penduduk miskin hanya sebesar 8,75% sedangkan pada tahun 2021 naik menjadi 9,01%. Hal ini dikarenakan faktor pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau mengurangi gaji karyawan. Penurunan pendapatan ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Selain itu, terjadinya kenaikan harga bahan pangan juga berkontribusi pada angka kemiskinan. Ketika harga bahan makanan naik, orang dengan pendapatan terbatas akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat menjadi salah satu indikator perekonomian yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Semakin banyak jumlah angkatan kerja yang terserap maka semakin banyak pula peningkatan pendapatan yang secara langsung akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kemiskinan adalah mengenai tenaga kerja yang diimplementasikan dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Dela Rahma Fauziah, Whinarko Juliprijanto, (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sangat penting karena apabila terdapat lebih banyak penduduk yang tidak bekerja, akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin.



Gambar 2. Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Sumatera Utara 2017-2022

Dapat dilihat pada grafik di atas, bahwa data Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja cukup berfluktuasi. Dalam teori ekonomi, tingginya angkatan kerja berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Artinya, tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi akan mendorong berkurangnya tingkat pengangguran terbuka, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan. Namun, berdasarkan grafik di atas pada tahun 2019 dan 2020 ketika Tingkat Partisipasi Angkatan kerja mengalami penurunan hal ini juga diikuti oleh penurunan Tingkat kemiskinan begitu pula sebaliknya, pada tahun 2021 ketika adanya kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja namun Tingkat kemiskinan juga mengalami kenaikan. Hasil yang berbeda ini membuat penelitian menjadi menarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai hubungan antara Tingkat Partisipasi Angkatan kerja dan Tingkat Kemiskinan, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Untuk mencapai pembangunan suatu bangsa yang maju maka dibutuhkan manusia dengan standar yang baik dalam berbagai aspek. Terdapat 3 indikator keberhasilan peningkatan kualitas hidup yaitu memiliki umur panjang dan kesehatan yang baik (long and healthy life), adanya wawasan dan pengetahuan yang luas (knowledge), serta standar kehidupan yang layak (standard of living) ketiga indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas pembangunan manusia, yang kemudian hal ini menjadi landasan adanya ukuran yang ditetapkan oleh United Nation Development Programmed (1990) dalam teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi atau rendahnya pembangunan manusia.



Gambar 3. Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Sumatera Utara 2017-2022

Dapat dilihat pada grafik di atas, bahwa data Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja cukup berfluktuasi. Secara umum, IPM berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tinggi IPM penduduk, semakin rendah tingkat kemiskinan. IPM yang tinggi menandakan adanya akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, sehingga mengurangi risiko kemiskinan. Namun, hal ini tidak sesuai pada grafik di atas, dimana pada tahun 2021 ketika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan namun Tingkat Kemiskinan juga mengalami kenaikan. Jika Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) meningkat maka kesejahteraan akan tinggi dan tingkat kemiskinan pun akan menurun Franciari & Sugiyanto, (2013) Hal ini senada dengan studi yang dilakukan oleh Jannatun Nufus, (2021) yang menyatakan bahwa meningkatnya Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan studi yang dilakukan oleh Sitanggung, (2020) yang mengutarakan bahwa Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap indeks kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil yang berbeda ini membuat penelitian menjadi menarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Kemiskinan, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan penjabaran dan fenomena di atas, diketahui bahwa kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara meningkat pada tahun 2021, hal ini dikarenakan masih belum meratanya pembangunan antar wilayah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Berbagai Pendapat ahli serta hasil riset yang mengkaitkan antara Tingkat Partisipasi Angkatan kerja dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan (*Research Gap*) dan berlawanan dengan arah teori. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2022”.

Kajian Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas dan terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya

sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal (Supriatnan, 1997). Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) terdapat empat pola kemiskinan. Dimana pola pertama yaitu kemiskinan persisten, yaitu kemiskinan kronis atau genetik. Pola kedua adalah kemiskinan siklis, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola seluruh siklus dunia. Pola ketiga adalah kemiskinan musiman, kemiskinan musiman ini terlihat dari kasus nelayan atau produsen pangan. Dan pola yang keempat adalah kemiskinan aksidental, dimana adanya dampak dari kebijakan tertentu yang mengarah pada kemiskinan akibat bencana alam atau tingkat kesejahteraan sosial yang lebih rendah. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (inter region income gap) (Harahap, 2006). Menurut Kuncoro (2003) terdapat beberapa penyebab kemiskinan diantaranya: Secara mikro, kemiskinan munculkan karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, Kemiskinan munculkan akibat adanya perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia, Kemiskinan munculkan karena perbedaan dalam mengakses modal.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut Sukirno, (2013) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat dinyatakan untuk seluruh tenaga kerja yang ada atau jumlah tenaga kerja menurut kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun desa-kota. Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik (2022) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap penduduk usia kerja. Menurut Mantra dalam (Fudloli & Sukidin, 2015) menjelaskan semakin besar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), semakin besar pula angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja dan akibatnya semakin kecil pula Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) nya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator atau proporsi penduduk yang aktif terlibat dalam dunia pekerjaan baik yang sudah memiliki pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Semakin besar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) akan semakin besar pula jumlah Angkatan kerja sedangkan semakin kecil Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berarti akan semakin kecil jumlah Angkatan kerja.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbit pada tahun 1990 yang dipelopori pertama kali oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan (HDR). Menurut BPS (2020) Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran yang menjabarkan mengenai bagaimana penduduk dapat memperbaiki kualitas hidup dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lainnya, sehingga dapat

menikmati hasil pembangunan. Sementara itu Mersiana, (2020) menyatakan bahwa Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) merupakan pencapaian pembangunan manusia yang diukur melalui tiga komponen keberhasilan yaitu, mendapatkan kehidupan yang sehat (longevity), memiliki standar kehidupan yang layak (living standards), dan memperoleh atau menguasai pengetahuan (knowledge). Untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dapat diukur melalui angka harapan hidup, untuk standar kehidupan yang layak biasanya diukur dengan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kemampuan daya beli masyarakat, sedangkan dalam mendapatkan pengetahuan, normalnya diukur dengan melihat rata-rata lama sekolah. Dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan tiga dimensi yang diantaranya:

1. Umur yang panjang dan hidup sehat pengukurannya dalam angka harapan hidup saat Kelahiran Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidup sejak kelahirannya. Sesuai standar UNDP, indeks harapan hidup dihitung dengan angka tertinggi sebagai batas maksimum dipakai 85 tahun dan yang terendah adalah 20 tahun.
2. Angka Harapan Sekolah (AHS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS) dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan sebagai pembentuk IPM diukur melalui indeks tingkat pendidikan. Dimana indikator yang digunakan yaitu rata-rata lama sekolah dan rata-rata harapan lama sekolah. Kedua indikator ini diberi bobot yang sama yang kemudian digabung dan digunakan sebagai faktor atau komponen pembentuk IPM.
3. Standar kehidupan yang layak yang diturunkan dari Produk Domestik Bruto (Kemampuan Belanja Perkapita). Standar hidup yang layak menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya perekonomian. BPS menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil output Eviews diatas diperoleh nilai probabilitas *Cross section Chi-Square* sebesar 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05 ($0,0000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji chow menolak H_0 model *Common Effect* dan menerima H_1 model *fixed effect*. Hal ini berarti bahwa model *fixed effect* lebih baik dibandingkan model *common effect*. Berdasarkan hasil uji Hausman diperoleh nilai probabilitas *Cross Section Random* sebesar 0.5962. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas tersebut lebih besar dari nilai tingkat signifikansi 5% atau 0,05 ($0.5962 > 0,05$), yang artinya uji hausman menerima H_0 yaitu *Random effect model*. Hal ini menunjukkan bahwa *Random Effect Model* lebih baik dibandingkan *Fixed Effect Model*. Berdasarkan hasil uji chow dan uji Hausman maka perlu dilakukan lagi uji *Langrange multiplier*. Berdasarkan hasil uji *Langrange Multiplier* diperoleh nilai probabilitas *Breusch pagan* sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi 5% atau 0,05 ($0,000 < 0,05$), yang artinya uji *Langrange Multiplier* menerima H_0 yaitu *Random effect model*. Hal ini menunjukkan bahwa *Random Effect Model* lebih baik dibandingkan *Common Effect Model*. Dari ketiga uji yang dilakukan dan hasil uji yang terpilih yaitu *Random Effect Model* (REM) terpilih sebanyak dua kali maka disimpulkan bahwa model REM terpilih sebagai model yang digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan hasil output Eviews memperlihatkan bahwa koefisien korelasi antar variabel Indeks pembangunan Manusia dan Tingkat pengangguran Terbuka memiliki nilai kurang dari 0,80. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Pembahasan

Berdasarkan hasil output Eviews diperoleh koefisien setiap variabel penelitian sehingga dapat dibentuk persamaan model analisis sebagai berikut:

$$\text{KEMISKINAN} = 61.0183568909 - 0.713472588995 \cdot \text{IPM} + 0.00692161266592 \cdot \text{TPAK} + [\text{CX}=\text{R}]$$

Dari hasil persamaan model diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Diperoleh konstanta sebesar **61.0183568909** dengan begitu dapat diperkirakan jika asumsi variabel independen yaitu IPM dan TPAK sama dengan 0, maka nilai kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara akan mengalami kenaikan sebesar 62.4073345925 persen.
2. Koefisien regresi variabel investasi sebesar - 0.713472588995 yang berarti setiap penurunan IPM sebesar 1 persen maka akan meningkatkan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0.713472588995 persen dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien nilai IPM bernilai negatif mengartikan bahwa terdapat hubungan negatif kemiskinan terhadap Indeks pembangunan manusia. Semakin tinggi IPM maka kemiskinan akan menurun.
3. Koefisien regresi variabel inflasi sebesar 0.00692161266592 yang berarti setiap kenaikan TPAK sebesar 1 persen maka akan meningkatkan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0.00692161266592 persen dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien nilai TPT bernilai positif mengartikan bahwa terdapat hubungan positif kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Semakin tinggi TPAK maka kemiskinan akan naik juga.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas setiap variabel sehingga dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan. Variabel IPM memiliki nilai t-Statistic sebesar -14.23254, artinya nilai t hitung (-14.23254) > t tabel (1,972204006) dan nilai probabilitas $0.0000 < \alpha = 5\%$ atau 0,05. Artinya bahwa variabel IPM secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafullah Gandasari (2016) di Provinsi Banten menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Apriliyah S. Napitupulu (2007) yang menyatakan Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator komposisi dalam perhitungannya yang diantaranya angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi perkapita. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah.
2. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan. Variabel inflasi memiliki nilai t-Statistic sebesar 0.677486, artinya nilai t hitung (0.677486) < t tabel (1,972204006) dan nilai probabilitas $0.4989 > \alpha = 5\%$ atau 0,05. Artinya bahwa variabel TPAK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Tidak signifikannya TPAK terhadap kemiskinan diduga disebabkan pendapatan yang dimiliki seseorang tersebut rendah meskipun individu tersebut bekerja karena pendapatannya rendah sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan atau dikatakan masi mengalami kemiskinan. Kedua, pekerjaan yang tersedia mungkin tidak memberikan upah yang cukup tinggi atau tidak menawarkan jaminan sosial seperti asuransi kesehatan atau pensiun yang dapat menyebabkan pekerja tetap berada dalam kondisi miskin. Salah satu teori yang membahas hubungan antara angkatan kerja dan kemiskinan adalah "Teori Pemasukan Minimum". Teori ini menyatakan bahwa tingkat penghasilan minimum yang diperlukan

untuk memenuhi kebutuhan dasar atau standar hidup tertentu akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Menurut teori ini, jika seseorang atau keluarga memiliki pendapatan di bawah tingkat pemasukan minimum, mereka akan berada dalam kemiskinan. Karena itu, mengangkat tingkat partisipasi angkatan kerja saja tidak akan cukup untuk mengurangi kemiskinan jika pekerjaan yang tersedia tidak memberikan penghasilan yang mencukupi. Teori ini juga menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah dalam menetapkan standar hidup minimum, melalui kebijakan upah minimum, perlindungan sosial, dan bantuan kesejahteraan lainnya untuk memastikan bahwa individu dan keluarga memiliki akses yang memadai ke sumber daya yang diperlukan untuk menghindari kemiskinan.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai f statistik sebesar 107.3631. Artinya F-statistic ($107.3631 > f_{tabel}(2,650913731)$) dan nilai probabilitas $0.000000 < \alpha = 5\%$ atau $0,05$. Sehingga secara simultan variabel IPM dan TPAK berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil regresi diperoleh nilai koefisien determinasi R (R-Squared) sebesar 0.524072 atau sebesar 52,40%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu IPM dan TPAK menjelaskan besarnya pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Adapun sisanya 47,59% dijelaskan dengan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Secara bersama-sama, angkatan kerja yang produktif dan IPM yang tinggi dapat saling mendukung dalam mengurangi kemiskinan. Misalnya, tingkat pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan peluang individu untuk memasuki pasar kerja dengan pekerjaan yang lebih baik, sementara pendapatan yang stabil dari pekerjaan tersebut dapat mendukung akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan untuk memperhatikan kedua faktor ini secara bersama-sama untuk mengurangi kemiskinan secara efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2017-2022. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menggunakan model Random Effect Model (REM), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa peningkatan IPM yang mencerminkan perbaikan dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, secara signifikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Setiap peningkatan IPM akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan jumlah penduduk miskin.
2. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Kemiskinan: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan dalam model yang digunakan. Meskipun secara teori peningkatan TPAK seharusnya dapat mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh TPAK terhadap kemiskinan tidak signifikan di Provinsi Sumatera Utara selama periode studi. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti kualitas pekerjaan yang tersedia, tingkat upah, serta ketidakcocokan antara keterampilan angkatan kerja dan kebutuhan pasar kerja.
3. Implikasi Kebijakan: Berdasarkan temuan penelitian ini, kebijakan yang difokuskan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta peningkatan standar hidup layak sangat penting untuk

mengurangi tingkat kemiskinan. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu memberikan perhatian lebih pada program-program yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, meskipun TPAK tidak signifikan dalam model ini, penting untuk tetap memperhatikan strategi peningkatan kesempatan kerja yang berkualitas, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan upah yang layak.

4. Keterbatasan dan Rekomendasi Penelitian Lanjutan: Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan variabel yang digunakan. Penelitian lanjutan disarankan untuk memasukkan variabel-variabel lain yang juga berpengaruh terhadap kemiskinan seperti inflasi, investasi, dan faktor-faktor sosial budaya. Selain itu, analisis yang lebih mendalam tentang kualitas pekerjaan dan dampak sektor ekonomi tertentu terhadap kemiskinan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang cara-cara efektif untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfionika, R., Yulmardi, Y., & Hardiani, H. (2021). Analisis determinasi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 10(1), 47–58. <https://doi.org/10.22437/jels.v10i1.12456>
- Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kawasan Tapal Kuda. In *Journal of Development Economic and Social Studies* (Vol. 2, Issue 2, pp. 313–326). <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.08>
- Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Serambi Engineering*, 5(2). <https://doi.org/10.32672/jse.v5i2.1925>
- Franciari, P. S., & Sugiyanto, F. X. (2013). Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten / Kota Di Indonesia Tahun 2008. *Diponegoro Journal Of Economics*, 2, 1–14.
- Jannatun Nufus, R. H. (2021). Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Pada Kab / Kota Di Provinsi Aceh.
- Mersiana, B. (2020). Analysis Of The Effect Of Gross Regional Domestic Product, Education, Open Unemployment, Minimum Wages And Human Development Index On Poverty Of West Nusa Tenggara Province In 2012-2017 (Case Study Of 10 Districts/Cities). Universitas Brawijaya.
- Simanjuntak, P. J. (2005). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sitanggang, D. C. E. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tenga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 4(2), 225. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v4i2.615
- Sukirno, S. (2013). *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Suripto, & Subayil, L. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Periode 2010-2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 127.